



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 54555 – 55627 – 54374 Padang
E-mail : bappedasumbar@gmail.com <http://www.sumbarprov.go.id>

K E P U T U S A N

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : B-900.1.15.5_3 /Set-2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertibnya pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) pada lampiran Keputusan ini selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2026 sebagai pelaksana kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. PPTK membantu tugas dan wewenang PA/KPA
 2. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
 - c) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA
 5. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh PPTK
 6. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PA/KPA setiap bulannya
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Padang, 13 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Lampiran : SK PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN/ PPTK Tahun 2026

NO	NAMA / GELAR	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Anggaran	Total Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Verawati Darman,SE	197208102006042000	Penata Tk.I III/d	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD), pada sub kegiatan ;		4.018.956.428
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.000
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.720.000
				3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	106.759.690
				4	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
				5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.244.149
				6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.601.800
				7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.810.000
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	807.696.412
				9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	377.000.000
				10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.150.000
				11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.576.174.377
				12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.550.000
				13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.050.000
				14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.600.000

NO	NAMA / GELAR	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Anggaran	Total Anggaran	
2	Yudha Prima, SSTP, M.Si	198201212000121000	Pembina Tk.I IV b	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD), pada sub kegiatan ;		1.137.785.000	
				1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	389.815.000	
				2	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	635.740.000	
				3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	112.230.000	
3	Rahmi Laila, S.Si, M.Si	198210302008021000	Pembina Tk.I IV b	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD), pada sub kegiatan ;		510.808.000	
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.608.000	
				2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	28.350.000	
				3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.750.000	
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.100.000	
4	Andre Ola Vetrik, SE, MM	196709271994031000	Pembina Tk.I IV b	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD), pada sub kegiatan ;		217.440.000	
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.050.000	
				2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	94.385.000	
				3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.444.000	
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	87.561.000	

NO	NAMA / GELAR	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Anggaran	Total Anggaran	
5	Widya Prima Hatta,ST,MT	197304191994122000	Pembina Tk.I IV b	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD), pada sub kegiatan ;			149.981.000
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.749.000	
				2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	36.619.000	
				3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.925.000	
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	43.688.000	

Padang, 13 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dr. Zefnihan, AP, M.Si